

## KRITIK SOSIAL MAJALAH TEMPO TERHADAP KASUS KELANGKAAN BERAS DI INDONESIA TAHUN 1972-1973

**SITI MUNIROH**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [sitimuniroh@mhs.unesa.ac.id](mailto:sitimuniroh@mhs.unesa.ac.id)

**Corry Liana**

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Majalah *Tempo* merupakan majalah yang didirikan oleh Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri. Majalah ini berhasil diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1971. Pendirian majalah *Tempo*, bertepatan dengan situasi pers Indonesia yang bebas dan cenderung berarah pada sistem pers liberal. Oleh karena itu, majalah *Tempo* tidak segan-segan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui pemberitaannya. Satu tahun setelah pendirian majalah *Tempo*, Indonesia mengalami kelangkaan beras pada akhir 1972 hingga pertengahan 1973 yang ditandai dengan naiknya harga beras. Majalah *Tempo* menunjukkan perannya dengan memberitakan kasus kelangkaan beras. Beberapa pemberitaan mengandung unsur kritik sosial karena berdampak pada masyarakat. Kritik yang disampaikan majalah *Tempo* ditujukan bagi pihak yang dianggap lalai dalam pengadaan beras nasional. Pihak-pihak tersebut yaitu pemerintah, BULOG, dan BUUD. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kritik sosial majalah *Tempo* terhadap kasus kelangkaan beras di Indonesia tahun 1972-1973; (2) Bagaimana respon pemerintah terhadap kritik majalah *Tempo* mengenai kasus kelangkaan beras tahun 1972-1973. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan). Berdasarkan tujuan penelitian dan latar belakang diatas, maka hasil penelitian ini yaitu dari 38 artikel majalah *Tempo* mengenai kasus kelangkaan beras tahun 1972-1973, terdapat tujuh artikel majalah *Tempo* yang mengandung kritik terhadap apatur Negara. Kritik majalah *Tempo* terhadap aparaturnegara sesuai dengan kondisi di dalam masyarakat karena didukung oleh sumber lain. Bahwasanya kelangkaan beras tahun 1972-1973 menyengsarakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kritik yang disampaikan majalah *Tempo* dipengaruhi oleh kondisi sistem pers saat itu yang cenderung mengarah pada sistem pers liberal. Penyampaian kritik oleh *Tempo* disebabkan oleh kinerja pemerintah dan aparatnya yang buruk. Dengan adanya kritik ini, diharapkan muncul kebijakan baru sebagai wujud evaluasi kinerja sebelumnya. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan majalah *Tempo* ini mendapatkan respon secara tidak langsung dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan kritik yang disampaikan majalah *Tempo*.

**Kata Kunci:** Kritik Sosial, Majalah *Tempo*, Kelangkaan Beras Tahun 1972-1973.

### Abstract

*Tempo* magazine is founded by Goenawan Mohamad and Fikri Jufri. The magazine was published on March 6, 1971. The establishment of *Tempo* magazine coincides with the free press situation of Indonesia and tends to lead to a liberal press system. Therefore, *Tempo* magazine does not hesitate to criticize government policy through its news. One year after the founding of *Tempo* magazine, Indonesia experienced a rice shortage in late 1972 until mid-1973 marked by rising rice prices. *Tempo* magazine shows its role by reporting on the case of rice scarcity. Some of the news contain elements of social criticism because it impacts on society. The criticism of *Tempo* magazine is for those who are considered negligent in the national rice procurement. The parties are government, BULOG, and BUUD. The formulation problem of this research are (1) How did the *Tempo* magazine's social criticisms of rice scarcity cases in Indonesia in 1972-1973; (2) How did the government's response to *Tempo* magazine's criticism of the 1972-1973 rice scarcity case. This research method uses historical research method that is heuristic (source collection), source critic, interpretation (interpretation), and historiography (writing). Based on the research objectives and background above, the result of this research is from 38 *Tempo* magazine article about the case of rice scarcity in 1972-1973, there are seven articles of *Tempo* magazine which contains criticism of State apparatus. *Tempo* magazine's criticism of the State apparatus is in accordance with the conditions in the community as it is supported by other sources. For the rice scarcity of 1972-1973 suffered most of the Indonesian people. The criticism of *Tempo* magazine was influenced by the condition of the press system that tended to lead to the liberal press system. Criticism by *Tempo* was caused by the poor performance of the government and its apparatus. With this criticism, new policy is expected to emerge as a form of previous performance evaluation. Therefore, the criticism of *Tempo* magazine received an indirect response from the government. The new policies implemented by the government are in line with the criticisms of *Tempo* magazine.

**Keywords:** Social Criticism, *Tempo* Magazine, Rice Rarity 1972-1973.

## PENDAHULUAN

Dunia pers, tidak lepas dari kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, suara dan gambar, serta dalam bentuk grafik maupun lainnya dengan menggunakan media elektronik, cetak, serta segala jenis media yang ada.<sup>1</sup> Pemberitaan pers, cenderung seputar kehidupan sosial masyarakat beserta kasus-kasus didalamnya. Pers juga menyoroti kehidupan politik suatu Negara, karena pers sering digunakan sebagai alat propaganda politik dan pengawas kebijakan pemerintah.

Sebagai bagian dari pers Indonesia, majalah *Tempo* cukup berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Majalah *Tempo* mengutamakan liputan berita jujur dan objektif, serta disajikan dengan bahasa yang menarik.<sup>2</sup> Sikap ini mendukung majalah *Tempo* untuk bertindak kritis pada kebijakan pemerintah beserta peristiwa yang memboncenginya, namun tetap pada koridor yang telah ditentukan. Berdasarkan sejarahnya, majalah *Tempo* merupakan majalah yang didirikan oleh sekumpulan pemuda yang pernah menjadi bagian dari Majalah Ekspres seperti Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri.<sup>3</sup> Majalah ini diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1971 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau yang biasa disebut sebagai periode Orde Baru.<sup>4</sup>

Di awal pemerintahan Orde Baru, pers mendapatkan ruang cukup bebas. Rosihan Anwar, pemilik harian *Pedoman* menyatakan bahwa periode 1966 - 1973 merupakan periode yang cukup baik bagi pers untuk mengungkapkan pemberitaan sesuai kehendaknya.<sup>5</sup> Kebebasan pers masa awal Orde Baru dapat disebabkan oleh evaluasi pemerintah Orde Baru terhadap rezim Orde Lama yang telah membelenggu kebebasan pers. Selain itu, kekuasaan Soeharto belum terkonsolidasi secara penuh.

Salah satu cita-cita *Tempo* ialah menyajikan berita dari daerah<sup>6</sup>, sehingga sejak awal diterbitkan *Tempo* selalu berusaha menyajikan berita yang berorientasi pada masyarakat tidak hanya pusat melainkan juga daerah. Majalah *Tempo* memang telah mengikuti alur kebijakan pers yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyajian berita dalam majalah *Tempo* tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan berbagai aspek. Majalah *Tempo* tidak segan untuk mengkritik kebijakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan koridor dan target yang telah ditentukan. Penulis Amaran Loebis mengatakan bahwa

*Tempo* bukan hanya sekedar kumpulan para editor, namun sebuah institusi yang membela pemikiran kritis.<sup>7</sup>

Setahun setelah diterbitkan majalah *Tempo*, Indonesia mengalami krisis atau kelangkaan beras. Kelangkaan terjadi karena persediaan beras di gudang BULOG tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Persediaan BULOG bulan Juli 1972 secara keseluruhan mencapai 986.000 ton. Saat itu harus didistribusikan sebesar 790.000 ton, sehingga persediaan tinggal 196.000 ton.<sup>8</sup> Selain itu, kelangkaan beras juga disebabkan oleh gagalnya panen akibat kemarau panjang. Hal ini menyebabkan persediaan beras di gudang BULOG tidak dapat mencukupi kebutuhan beras masyarakat Indonesia. BULOG juga telah mengurangi impor beras karena sikap optimisme bahwa tahun 1972 produksi beras akan meningkat.<sup>9</sup> Sikap optimisme yang ditunjukkan BULOG, didasarkan pada peningkatan produksi beras tahun 1968-1971. Berikut data produksi beras tahun 1968-1972 :

**Tabel 1.1 Produksi Beras Tahun 1968-1972**  
(1.000 ton)

	1968	1969	1970	1971	1972
Jawa	7.043	7.481	7.868	8.416	8.061
Luar Jawa	4.623	4.768	5.272	5.308	5.230
Indonesia	11.666	12.249	13.140	13.724	13.291

Sumber : Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Buku II Bab VI Pertanian dan Irigasi, (<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-i---buku-ii/>, diakses pada 04 April 2018 pukul 12:43 WIB).

Data diatas menunjukkan bahwa produksi beras di Indonesia tahun 1968-1971 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 11.666 ribu ton menjadi 13.724 ribu ton. Namun pada tahun 1972 produksi beras mengalami penurunan sebesar 433 ribu ton, padahal jumlah permintaan masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan beras meningkat.<sup>10</sup> Jumlah persediaan dan permintaan beras yang tidak seimbang, menyebabkan beras mengalami kelangkaan.

Beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, dapat menjadi permasalahan tersendiri jika keberadaannya sulit didapatkan. Selain mengganggu kestabilan ekonomi, kelangkaan beras juga berakibat pada kegoncangan politik. Pemerintah selaku

<sup>1</sup>As Haris Sumadira, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature "Panduan Praktis Jurnalis Profesional"*, (Bandung : Simbiosis Sekatama Media, 2005), hlm 31.

<sup>2</sup> Dikutip dari laman Tempo Media Grup (<https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 09.47 WIB).

<sup>3</sup> Dikutip dari Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk "Annual Report Of PT Tempo Inti Media Tbk" tahun 2016.

<sup>4</sup> "Tragedi Minami dan Kongres PBSI" *Tempo*, 12 Januari 1971.

<sup>5</sup> Menurut Rosihan Anwar tahun 1966 - 1969 pers mulai bangkit dan berbicara setelah terlelap oleh kebijakan masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin). Sedangkan tahun 1969 - 1973 merupakan periode terbaik pers. Ahmad Zaini Abar, *1966 - 1972 Kisah Pers Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS, 1995), hlm 2.

<sup>6</sup> Ratjul Kahfi, "Rentjana Kulit Muka" *Tempo*, 13 Maret 1972.

<sup>7</sup> Janet Steele, *Wars Within : The Story of Tempo an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*, (Jakarta : Equinox Publishing Indonesia, 2005), hlm 143.

<sup>8</sup> Fausan Adi Azhari, "Pasang Surut Sejarah BULOG di Indonesia pada tahun 1967-1998 (Up and Down History of BULOG in Indonesia 1967-1998)", dalam Digital Repository Universitas Jember, Desember 2015, (Jember : UNEJ Press, 2015), hlm 11 (<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68824>, diakses pada 2 Desember 2017 pukul 11:00 WIB).

<sup>9</sup> Arifin Hutabarat, *Usaha Mengatasi Krisis Beras*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1974), hlm 14.

<sup>10</sup> Bappenas, *Repelita I (Ikhtisar Repelita I)*, diakses dari [bappenas.go.id](http://bappenas.go.id), pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 13.27 WIB, hlm 25.

aktor politik, akan disangkakan tidak becus dalam mengelola kebutuhan perut masyarakat Indonesia ini. Hal ini tentunya tidak luput dari pemberitaan media massa, seperti halnya majalah *Tempo*. Majalah *Tempo*, pernah sesekali menyinggung ketidaksanggupan pemerintah dalam mengolah peredaran beras.

Majalah *Tempo* selaku media pers nasional, cukup gencar dalam memberitakan kasus kelangkaan beras di akhir tahun 1972 hingga pertengahan tahun 1973 dan terkadang menjadi topik utama majalah *Tempo* saat diterbitkan.<sup>11</sup> Beberapa artikel yang diterbitkan majalah *Tempo*, mengandung unsur kritik sosial. Menurut Akhmad Zaini Abar, kritik sosial merupakan bagian dari bentuk komunikasi masyarakat yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai pengawas atau kontrol terhadap mekanisme bermasyarakat dan sistem sosial.<sup>12</sup> Kritik sosial juga dapat diartikan sebagai inovasi sosial.<sup>13</sup> Maksudnya yaitu kritik sosial menjadi perantara penyampaian gagasan atau pemikiran baru untuk mencapai perubahan sosial. Salah satu wahana yang digunakan untuk menyampaikan kritik sosial adalah media massa atau pers.

Kritik sosial dalam diri pers atau media massa, cenderung dihadapkan dengan kekuatan atau *power*, dan kekuasaan Negara atau pemerintah.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kritik yang disampaikan majalah *Tempo* ditujukan untuk pihak yang terkait dengan pengelolaan beras seperti pemerintah. Pihak lain yang juga menjadi sasaran kritik majalah *Tempo* ialah BULOG selaku lembaga pemerintah yang mengatur dan mengendalikan peredaran beras di Indonesia.<sup>15</sup> Selain itu, BUUD dan Bank Pemerintah juga tidak luput dari sasaran kritik majalah *Tempo*. Hal ini menunjukkan bahwa majalah *Tempo* menjalankan fungsi normatif sebagai media massa yaitu sebagai alat kontrol sosial. Padahal pemberitaan yang mengandung unsur kritik secara tidak langsung dapat mencederai rezim yang baru saja menancapkan hegemoninya.

Alasan diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kritik Sosial Majalah Tempo Terhadap Kasus Kelangkaan Beras di Indonesia Tahun 1972-1973". Selain itu, pemberitaan yang mengandung unsur kritik disampaikan dengan prosa yang menarik dan cukup jenaka. Kritik sosial majalah *Tempo* terhadap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan beras dapat dikatakan sebagai embrio kekritisannya majalah *Tempo* terhadap kebijakan pemerintah hingga pemberhentian terbitnya selama dua minggu di tahun 1974.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kritik sosial majalah *Tempo* terhadap kasus kelangkaan beras di Indonesia tahun 1972-1973;

2. Bagaimana respon pemerintah terhadap kritik majalah *Tempo* mengenai kasus kelangkaan beras tahun 1972-1973.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah. Sehingga metode yang digunakan yaitu metode sejarah. Metode sejarah merupakan prinsip – prinsip sistematis yang membantu dalam proses pengumpulan sumber, penilaian kritis sumber, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.<sup>17</sup> Menurut Louis Gotschalk dalam menuliskan peristiwa sejarah, sejarawan membutuhkan sumber atau dokumen. Dokumen tersebut harus dapat dipercaya sebagai acuan penulisan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu bantu sejarah.<sup>18</sup>

Metode sejarah dalam penelitian ini, mencakup empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.<sup>19</sup>

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan metode sejarah yang berkenaan dengan kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini sumber-sumber yang akan digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kumpulan pemberitaan majalah *Tempo* terkait kasus kelangkaan beras tahun 1972 – 1973. Sumber primer lain berupa Undang - Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966 dan Undang - Undang No. 4 tahun 1967 serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969. Sumber berupa undang - undang didapatkan dari internet. Selain pemberitaan majalah, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku – buku mengenai kehidupan pers di Indonesia terutama tahun 1972 - 1973.

### 2. Kritik

Tahap kritik merupakan tahap pengujian sumber. Didalam proses kritik sumber, terdapat dua tahapan yaitu kritik ekstern dan intern. Pada penelitian ini, tahap kritik yang digunakan ialah kritik intern. Kritik intern merupakan tahap pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Pengujian dilakukan pada sumber primer dan sekunder yang digunakan dengan mengklarifikasi sumber tersebut. Dilakukannya kritik intern agar penulis dapat menentukan kredibel atau tidaknya suatu sumber sejarah. Dalam tahap kritik intern, data yang telah dikumpulkan melalui proses heuristik diseleksi menjadi fakta sejarah. Penelitian ini berkisar pada pemberitaan majalah *Tempo*

<sup>11</sup> "Beras, Gula, Terigu Goncang" *Tempo*, 28 Oktober 1972, "Antri Menolak Lapar" *Tempo* 16 Desember 1972, dan "Dari Januari Kelabu ke Desember Antri" *Tempo*, 30 Desember 1972.

<sup>12</sup> Akhmad Zaini Abar, *Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia*. UNISA No. 32/XVII/IV/1997, hlm 44.

<sup>13</sup> Akhmad Zaini Abar, "Kritik Sosial, Negara, dan Demokrasi" (Republika, 8 Maret 1994).

<sup>14</sup> *Loc.cit.*, hlm 45.

<sup>15</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik pasal 2 menyebutkan bahwa BULOG

memiliki tugas "melakukan pengendalian dan pelaksanaan kbidjaksanaan Pemerintah dibidang : pengadaan, penyaluran kepada berbagai golongan yang memerlukan, dan penediaan buffer stock". Selain itu, BULOG juga bertugas menstabilkan harga beras.

<sup>16</sup> Ignatius Haryanto, *Pembredelan Pers di Indonesia*, (Jakarta : PT Mega Media Abadi, 1996), hlm 66.

<sup>17</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2005), hlm 10.

<sup>18</sup> Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 18.

<sup>19</sup> Aminuddin Kasdi, *op. cit.*, hlm 10 - 11

terkait kasus kelangkaan beras tahun 1972-1973, sehingga sebagian besar sumber yang digunakan berasal dari majalah *Tempo*. Melalui kritik intern ini, penulis melakukan seleksi terhadap pemberitaan majalah *Tempo* tahun 1972-1973 terkait kasus kelangkaan beras yang hanya difokuskan pada pemberitaan yang mengandung unsur kritik sosial.

### 3. Interpretasi

Tahap ketiga ialah interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan antar fakta yang telah ditemukan dan menafsirkannya. Sumber-sumber yang telah melalui proses kritik, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian teori dan buku – buku yang berkaitan. Tahap interpretasi juga meliputi analisis fakta yang telah ditemukan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert Entman. Analisis *framing* merupakan langkah rekonstruksi realitas peristiwa, kelompok, dan tokoh yang disajikan oleh media.<sup>20</sup> Pada dasarnya, analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman memiliki dua aspek utama yaitu proses seleksi isu dan penekanan dimensi realitas. Konsep *framing* yang dikemukakan Robert Entman merujuk pada definisi, penjelasan, penilaian atau evaluasi, dan merekomendasikan pemikiran tertentu terhadap suatu peristiwa.<sup>21</sup> Analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman memiliki empat tahapan yaitu :

1. *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu penglihatan permasalahan dari sudut pandang bagaimana peristiwa atau isu dipahami. Adanya perbedaan pemahaman mengenai peristiwa, maka penggambaran realitas juga berbeda.
2. *Diagnosa Cause* yaitu faktor yang melatarbelakangi terjadinya masalah. Hal ini berkaitan dengan elemen atau subjek utama penyebab permasalahan.
3. *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral) yaitu memberikan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan menggunakan. Media biasanya menggunakan nilai moral untuk menjelaskan masalah dan melakukan legitimasi tindakan.
4. *Treatment Recommendation* (penekanan pada penyelesaian) yaitu menawarkan penyelesaian masalah dan melakukan penilaian terhadap hal yang dilakukan wartawan.

### 4. Heuristik

Tahap keempat yaitu Historiografi atau penulisan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Penulisan dilakukan dengan merangkai fakta yang telah ditafsirkan sesuai dengan sistematika penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Majalah *Tempo* Dalam Pers Nasional

Majalah *Tempo* merupakan majalah yang didirikan oleh sekumpulan pemuda generasi '66 yaitu Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri.<sup>22</sup> Proses penerbitan majalah *Tempo* tidak mudah, banyak faktor yang melatarbelakangi pendirian majalah fenomenal ini. Goenawan Mohamad sebagai pencetus majalah *Tempo* memiliki pengalaman menarik sebelum dan saat menerbitkan majalah *Tempo*.

Fikri Jufri dan Goenawan Mohamad sempat mencari-cari investor untuk mendanai pendirian majalah *Tempo*. Akhirnya Ciputra yang merupakan CEO dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya atau Pengembangan Jaya Group bersedia menjadi investor dalam pendirian majalah *Tempo*. Hal ini juga tidak lepas dari peran Lukman Setiawan yang menjadi perantara bertemunya Goenawan dan Fikri dengan Ciputra. Bahkan Lukman menemui secara personal Harjoko Trisnadi untuk menyampaikan undangan Ciputra dengan agenda membahas pendirian majalah *Tempo*.<sup>23</sup> Ciputra melalui yayasannya bersedia untuk menjadi investor majalah *Tempo*, karena melalui peristiwa ini Ciputra terlihat berkeinginan untuk mengembangkan media pers. Selain itu sosok yang akan menjalankan majalah yang didanai oleh Ciputra, memiliki sepak terjang cukup handal dibidang jurnalistik. Berdasarkan keputusan Menteri Penerangan RI No. 01068/SK/Dir. PP/SIT/1970, majalah *Tempo* telah mengantongi SIT (Surat Izin terbit) sejak tanggal 31 Desember 1970. Namun pertama kali terbit pada tanggal 6 Maret 1971, karena baru mengantongi SIC (Surat Ijin Cetak) pada tanggal 12 Januari 1971.<sup>24</sup>

Majalah *Tempo* diterbitkan pada era berlakunya sistem pers liberal di Indonesia yaitu pada tanggal 6 Maret 1971. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pers masa awal Orde Baru yang tidak membatasi golongan manapun untuk menerbitkan media massa. Di awal masa Orde Baru yaitu tahun 1969-1973, kebebasan pers semakin terjamin. Bahkan Mochtar Lubis, mantan pemimpin redaksi *Indonesia Raya* menyatakan bahwa pers pada awal Orde Baru telah kembali membela kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan, menegakkan hukum dan hak asasi, martabat dan kebebasan manusia.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sosok Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri yang merupakan seorang wartawan biasa dan bukan berasal dari kalangan elit politik dapat mendirikan media pers independen di awal Orde Baru.

Majalah *Tempo* tidak berafiliasi dengan pemerintah, sehingga majalah *Tempo* turut memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah serta menyajikan kebenaran. Berdasarkan konsep dasar kebebasan pers tersebut, majalah *Tempo* menerapkannya saat terjadi peristiwa kelangkaan beras di Indonesia tahun 1972-1973. *Tempo* memberikan kritik terhadap pemerintah dan aparatnya terkait kebijakan dan kinerjanya yang belum mampu mengumpulkan persediaan beras. Oleh karena itu, pada tahun 1972-1973, sistem pers yang berlaku di Indonesia tentunya sistem pers liberal.

<sup>20</sup> Eryanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, (Yogyakarta : LKiS, 2002), hlm 3.

<sup>21</sup> Bimo Nugroho, Eryanto, Fransurdiadis, *Politik Media Mengemas Berita*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm 6.

<sup>22</sup> Dikutip dari Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk "Annual Report Of PT Tempo Inti Media Tbk" tahun 2016.

<sup>23</sup> Coen Husain Pontoh, *Op. Cit.*, hlm 93

<sup>24</sup> "Tragedi Minarni dan Kongres PBSI" *Tempo*, 12 Januari 1971, hlm 1.

<sup>25</sup> Akhmad Zaini Abar, *ibid.*, hlm 1.

**B. Kritik Sosial Majalah *Tempo* Terhadap Kasus Kelangkaan Beras Tahun 1972-1973**

Pemberitaan majalah *Tempo* yang membahas kasus kelangkaan beras tahun 1972 hingga 1973 sejumlah 38 pemberitaan.<sup>26</sup> Sedangkan pemberitaan yang mengandung unsur kritik sosial sejumlah 7

**Tabel 3.1 Artikel Berita Kelangkaan Beras Tahun 1972-1973 Majalah *Tempo* yang Mengandung Kritik Sosial**

No.	Judul Artikel Berita	Tanggal Publikasi
1.	Ratu Pelita Sedang Gundah	18 Oktober 1972
2.	Antara Ada dan Tiada	18 Nopember 1972
3.	Jerawat-Jerawat Sang Ratu	16 Desember 1972
4.	Konflik dalam Hajat dan Hambatan	30 Desember 1972
5.	Diusik Instruksi James Bond	19 Mei 1973
6.	Bak Belanda Minta Tanah	16 Juni 1973
7.	Menekan Beban Impor	23 Juni 1973

Sumber : Olah data majalah *Tempo* edisi 18 Oktober 1972-23 Juni 1973

Kritik sosial yang disampaikan *Tempo* melalui pemberitaan-pemberitaannya, menandakan bahwa majalah *Tempo* menjalankan haknya sebagai media pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Berikut penjelasan kritik sosial majalah *Tempo* yang ditujukan untuk BULOG, Pemerintah, BUUD dan Bank Pemerintah :

**1. Kritik *Tempo* untuk BULOG**

Salah satu pemberitaan yang mengandung kritik terhadap BULOG yaitu “Jerawat-Jerawat Sang Ratu” edisi 16 Desember 1972. Berdasarkan analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman, maka rekonstruksi pemberitaan tersebut yaitu :

**Tabel 3.2 Berita, Jerawat-Jerawat Sang Ratu**

Skema Pembingkai	Pendefinisian Masalah	Kekurangan pelaksanaan kebijakan <i>dropping</i> beras oleh BULOG.
	Penyebab Masalah	Polemik antri panjang dan munculnya spekulasi yang memanfaatkan <i>dropping</i> beras.
	Menentukan Keputusan Moral	Adanya penurunan harga beras akibat <i>dropping</i> , namun hanya di beberapa wilayah.
	Menekankan Penyelesaian	Perlu kelancaran dalam proses distribusi serta penambahan aparat yang bertugas untuk menyalurkan beras <i>dropping</i> .

Sumber : “*Jerawat-Jerawat Sang Ratu*” (*Tempo*, 16 Desember 1972).

Pemberitaan diatas, majalah *Tempo* mengkritisi kebijakan BULOG yaitu *dropping* beras. Majalah *Tempo* memberikan pernyataan bahwa *dropping* beras masih belum dapat menjamin untuk mengatasi kelangkaan beras karena harga beras turun hanya berada di beberapa wilayah saja. Analisis *framing* pada berita selanjutnya yaitu :

**Tabel 3.3 Berita, Konflik Dalam Hajat dan Hambatan**

Skema Pembingkai	Pendefinisian Masalah	Harga beras tidak stabil hingga akhir tahun 1972.
	Penyebab Masalah	BULOG tidak menyusun laporan sesuai kenyataan.
	Menentukan Keputusan Moral	Kegagalan BULOG berdampak pada ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatur aparatnya.
	Menekankan Penyelesaian	Musim kemarau bukan satu-satunya penyebab kelangkaan beras di tahun 1972.

Sumber : “*Konflik Dalam Hajat dan Hambatan*” (*Tempo*, 30 Desember 1972).

Kritik yang disampaikan oleh *Tempo* menandakan bahwa *Tempo* melihat permasalahan tidak hanya satu sisi saja yaitu kemarau panjang. Namun *Tempo* juga melihat sisi lain seperti kebijakan penguasa (pemerintah dan BULOG). Seperti yang disampaikan oleh Siebert, majalah *Tempo* telah melaksanakan fungsinya sebagai pers yaitu mengawasi kebijakan pemerintah dengan memberikan kritik terhadap BULOG dan presiden.

Pemberitaan selanjutnya berjudul “Ratu Pelita Sedang Gundah” sehingga analisis *framing* Robert Entman pada pemberitaan ini yaitu :

**Tabel 3.4 Berita, Ratu Pelita Sedang Gundah**

Skema Pembingkai	Pendefinisian Masalah	Harga beras yang melambung tinggi.
	Penyebab Masalah	BULOG dianggap tidak mampu menjaga stabilitas harga beras.
	Menentukan Keputusan Moral	Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh kepala BULOG dianggap tidak menarik oleh <i>Tempo</i> .
	Menekankan Penyelesaian	Memperbaiki kinerja BULOG.

Sumber : “*Ratu Pelita Sedang Gundah*” (*Tempo*, 28 Oktober 1972).

Berdasar pada sudut pandang majalah *Tempo*, usaha impor yang dilakukan oleh BULOG tidak menarik perhatian *Tempo*. Hal ini seakan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BULOG untuk mengatasi kenaikan harga beras akan sia-sia menurut majalah *Tempo* karena kenaikan terlanjur terjadi. Pada artikel ini, *Tempo* memiliki sikap pesimistis terhadap usaha BULOG untuk menangani kelangkaan beras.

**2. Kritik *Tempo* untuk Pemerintah**

Kritik yang dilontarkan *Tempo* kepada pemerintah, terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Adam Malik mengenai usaha impor beras yang dilakukan pemerintah. Berikut analisis *framing* pemberitaan ini :

**Tabel 3.6 Berita, Antara Ada dan Tiada**

Skema Pembingkai	Pendefinisian Masalah	Beras impor dengan kualitas buruk.
------------------	-----------------------	------------------------------------

<sup>26</sup> Olah data primer dari Majalah *Tempo* Edisi 16 September 1972-23 Juni 1973, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya.

	<b>Penyebab Masalah</b>	Pemerintah membeli beras impor tanpa melihat kualitas.
	<b>Menentukan Keputusan Moral</b>	Keputusan impor yang dilakukan oleh pemerintah, dianggap tindakan asal beli.
	<b>Menekankan Penyelesaian</b>	Untuk mengurangi impor beras dan menambah produksi nasional, majalah <i>Tempo</i> menjabarkan solusi yang berasal dari Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi.

Sumber : "Antara Ada dan Tiada" (Tempo, 18 Nopember 1972).

*Tempo* menyatakan bahwa kualitas beras impor asal Tiongkok tidak diperdulikan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sehingga pemerintah mendapatkan kritikan dari Majalah *Tempo*. Kritikan yang dilontarkan *Tempo* cukup tajam dan bisa berdampak besar bagi eksistensi majalah *Tempo* sebagai media cetak. Kritik tidak dijabarkan secara langsung, melainkan melalui sebuah sindiran implisit terhadap pemerintah. Pemerintah disebut sebagai "induk ayam yang mengorek sisa makanan dari bak sampah".

Kritik selanjutnya mengenai kebijakan larangan transaksi beras antar provinsi dalam satu pulau. Berikut analisis *framing* Robert Antmen pemberitaan ini :

**Tabel 3.7 Berita, Menekan Beban Impor**

Skema Pembungkahan	<b>Pendefinisian Masalah</b>	Kekurangan persediaan beras di suatu wilayah.
	<b>Penyebab Masalah</b>	Larangan distribusi beras antar provinsi oleh pemerintah
	<b>Menentukan Keputusan Moral</b>	Keputusan melarang distribusi beras antar daerah oleh pemerintah merupakan keputusan yang salah.
	<b>Menekankan Penyelesaian</b>	Penghapusan larangan distribusi beras antar daerah.

Sumber : "Menekan Beban Impor" (Tempo, 23 Juni 1973).

Pada pemberitaan diatas *Tempo* menyatakan bahwa keputusan pemerintah melarang distribusi beras antar wilayah adalah suatu kesalahan. Hal ini dikarenakan larangan angkutan beras antar wilayah merupakan salah satu penyebab daerah kekurangan beras tidak dapat ditopang oleh daerah lain yang kelebihan beras.

**3. Kritik Tempo untuk BUUD**

Berikut analisis berita majalah *Tempo* yang mengandung unsure kritik terhadap BUUD berdasarkan analisis *framing* Robert Entman :

**Tabel 3.8 Berita, Dusia Instruksi James Bond**

Skema Pembungkahan	<b>Pendefinisian Masalah</b>	Pemaksaan pembelian beras petani oleh BUUD.
	<b>Penyebab Masalah</b>	Pemenuhan target persediaan beras nasional.
	<b>Menentukan Keputusan Moral</b>	BUUD bertindak tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

	<b>Menekankan Penyelesaian</b>	Perlu adanya pengkajian ulang terhadap kinerja petugas BUUD sebagai pembela ekonomi petani
--	--------------------------------	--

Sumber : "Dusia Instruksi James Bond" (Tempo, 19 Mei 1973).

Pemberitaan majalah *Tempo* diatas jelas mengungkapkan kritik pada BUUD. Majalah *Tempo* menganggap bahwa pembentukan BUUD tidak memihak para petani. Adanya BUUD digunakan sebagai sarana penekanan vertikal dari pejabat daerah kepada petani.

Selain pemberitaan diatas, terdapat pemberitaan lain yang mengandung kritikan terhadap BUUD. Berikut analisis pemberitannya :

**Tabel 3.9 Berita, Bak Belanda Minta Tanah**

Skema Pembungkahan	<b>Pendefinisian Masalah</b>	Penggabungan koperasi desa dan BUUD di desa Pusaka Ratu, kabupaten Subang.
	<b>Penyebab Masalah</b>	BUUD mengambil alih koperasi dan memiliki kekayaannya tanpa prosedur.
	<b>Menentukan Keputusan Moral</b>	Majalah <i>Tempo</i> menyebut BUUD seperti Belanda minta tanah.
	<b>Menekankan Penyelesaian</b>	Dalam melakukan penggabungan dengan koperasi lain, BUUD harus melalui proses inventarisasi terlebih dahulu.

Sumber : "Bak Belanda minta Tanah" (Tempo, 16 Juni 1973).

Pada pemberitaan ini, Majalah *Tempo* menyebut BUUD seperti "Belanda minta tanah". Bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh BUUD dalam mengakui sepihak dan mengambil alih koperasi dibawah kendali BUUD adalah tindakan yang tidak sesuai prosedur. Sama halnya dengan Belanda tidak berhak untuk memiliki wilayah Indonesia, namun melakukan pemaksaan untuk mengambil alih sistem pemerintahan di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh BUUD ini, tidak sesuai dengan prosedur.

Kritik yang disampaikan majalah *Tempo*, membuktikan bahwa *Tempo* melaksanakan fungsi dan konsep dasar sistem pers liberal yang berlaku pada masa awal Orde Baru. Fungsi pers pada sistem pers liberal yang dijalankan oleh majalah *Tempo* ialah sebagai monitor atau pengawas pemerintah, terutama dari segi kebijakan. Selain itu majalah *Tempo* memberikan informasi terkait peristiwa kelangkaan beras yang terjadi pada tahun 1972-1973. Informasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi perberasan di tahun 1972-1973. Konsep dasar yang sesuai dengan kebebasan pers menurut John Kean yaitu menilai kebijakan pemerintah dan tidak ada unsur campur tangan pemerintah dalam pemberitaan.

**C. Respon Pemerintah Terhadap Kritik Majalah Tempo Terkait Kasus Kelangkaan Beras Tahun 1972-1973**

Pemberitaan majalah *Tempo* yang mengandung unsur kritik terhadap pemerintah dan aparatnya, mengundang respon dari pemerintah. Respon pemerintah terkait kritik majalah *Tempo*, tidak diungkapkan secara langsung melalui surat peringatan atau ancaman pencabutan SIT (Surat Izin Terbit). Namun pemerintah merespon kritik ini

dengan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki kinerja aparatnya yang kurang kompeten. Selain kritik majalah *Tempo*, kebijakan ini juga dapat dipicu oleh keadaan sosial masyarakat Indonesia yang tidak stabil karena kelangkaan beras. Ditambah dengan kecaman beberapa pihak yang mengkritik pemerintah dan aparatnya karena dianggap tidak mampu mengurus persediaan beras nasional. Kecaman tersebut disampaikan melalui media pers, salah satunya adalah majalah *Tempo*. Berikut beberapa respon pemerintah terkait kritik majalah *Tempo* :

### 1. Penambahan *Dropping* beras

Pemberitaan majalah *Tempo* tanggal 16 Desember 1972 berisi tentang kritik *Tempo* terhadap kebijakan *dropping* beras yang dilakukan pemerintah. Bahwasanya *dropping* beras yang dilakukan pemerintah pada bulan Desember, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menambah jumlah *dropping* beras di bulan Januari hingga Maret 1973. Berikut tabel jumlah *dropping* beras bulan Desember hingga Maret tahun 1972/1973 :

**Tabel 4.1 Jumlah *Dropping* Beras Bulan Desember-Maret Tahun 1972/1973 (Dalam Ton)**

No.	Bulan	Jumlah
1.	Desember	109.866
2.	Januari	141.563
3.	Februari	134.283
4.	Maret	179.735

Sumber : Bappenas, *Laporan Pelaksanaan Repelita I 1969/1970-1974/1975*, (Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas, 1974), hlm 225.

*Dropping* beras pada bulan Desember sebesar 109.866 ton, tidak mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakat. Oleh karena itu, pada bulan Januari pemerintah menambah *dropping* beras hingga sebesar 141.563 ton. Kemudian penambahan paling besar pada bulan Maret yaitu sebesar 179.735 ton. per bulan,<sup>27</sup> belum mampu menstabilkan harga beras dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menambah jumlah beras *dropping* hingga sebesar 141.563 ton pada bulan Januari 1973.<sup>28</sup> Sedangkan *dropping* beras paling besar yaitu pada bulan Maret 1973 sebesar 179.735 ton. Penambahan beras *dropping* ini dilakukan hingga bulan Maret 1973 karena menurut sekretaris Negara Sudharmono SH, masa paceklik di Indonesia berlangsung hingga bulan Maret 1973.<sup>29</sup> Selain itu, musim tanam rendengan berlangsung pada bulan November 1972 sampai Maret 1973 sehingga bulan April petani Indonesia mulai memanen hasil tanamnya. Meskipun pada bulan April petani di Indonesia telah memanen padi, pemerintah tetap melakukan *dropping* beras tetapi tidak sebesar pada bulan sebelumnya yaitu sejumlah 76.204 ton.<sup>30</sup> *Dropping* beras yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari pembelian beras

dalam negeri dan juga luar negeri (impor). Pada periode 1972/1973 pembelian beras dalam negeri jauh dibawah beras impor yaitu sebesar 138.000 ton.<sup>31</sup> Sedangkan beras yang didatangkan dari luar negeri dalam rangka komersil maupun bantuan sebesar 1.219.525 ton.<sup>32</sup>

### 2. Memperbaiki Kinerja BULOG

Berkaitan dengan pemberitaan *Tempo* yang mengkritik BULOG, maka pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka perbaikan kinerja BULOG, Presiden Soeharto selaku penanggungjawab BULOG memberikan penuturannya kepada petugas BULOG untuk memperbaiki kinerjanya. Pesan ini disampaikan saat amanat pembukaan rapat kerja BULOG pada tanggal 17 Januari 1973 di Jakarta.<sup>33</sup> Amanat Presiden Soeharto pada pembukaan rapat kerja BULOG bukan semata-mata pesan formalitas semata. Namun amanat yang disampaikan menunjukkan keseriusan presiden dalam memberikan pengarahannya bagi kinerja BULOG yang kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan usaha-usaha BULOG yang terus dilakukan demi menciptakan stabilitas harga seperti melakukan kerja sama dengan BUUD. Selain itu, BULOG mendirikan kios penjualan beras di beberapa wilayah untuk menghindari praktek oknum penjual yang tidak bertanggung jawab.<sup>34</sup> Selain itu, BULOG juga mampu menurunkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara musim panen dan paceklik pada periode 1972/1973 dan 1973/1974. Kondisi ini menjadikan BULOG terus mengevaluasi kinerjanya hingga BULOG benar-benar mampu mencapai kestabilan harga beras.

### 3. Memperbaiki kinerja BUUD

Dalam memperbaiki kinerja BUUD, presiden memberikan penyuluhan secara langsung pada petugas BUUD di daerah. Pada kunjungan kerja tidak resminya hari Jum'at tanggal 11 Mei 1973, Presiden Soeharto melakukan penyuluhan pada petugas BUUD tepatnya di daerah Kartosuro, Delanggu, Sleman, dan Bantul, Jawa Tengah.<sup>35</sup> Selain itu pada hari Sabtu 12 Mei 1973, Presiden Soeharto juga melakukan penyuluhan serupa di wilayah Nganjuk Jawa Timur. Penyuluhan ini tidak hanya ditujukan untuk petugas BUUD dan KUD saja, melainkan para pejabat daerah di Jawa Timur. Pejabat tersebut meliputi anggota DPRD, Bupati, Camat dan Lurah seluruh Jawa Timur. Hal ini diperlukan agar pejabat daerah dan petugas BUUD dapat bersinergi menghimpun beras yang ada di daerah, sehingga dapat memenuhi target stok nasional yang telah ditentukan. Selain itu, kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dapat dihindari serta menghilangkan unsur pemaksaan terhadap petani. Usaha Presiden Soeharto untuk memperbaiki kinerja BUUD membuahkan hasil yaitu terlihat dari jumlah BUUD yang terus meningkat sejak pertama didirikan pada

<sup>27</sup> Bappenas, *Laporan Pelaksanaan Repelita I 1969/1970-1974/1975*, (Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas, 1974), hlm 186.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Arifin Hutabarat, *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. (Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers. 1974), hlm 121.

<sup>30</sup> Tabel V-7 Jumlah Penyaluran Beras ke Pasar Dalam Tahun 1972/73 dan 1973/74 (dalam ton), dalam *Op.Cit.*

<sup>31</sup> *Op.Cit.*, hlm 253.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 255.

<sup>33</sup> Dokumen Resmi Negara Tentang Amanat Presiden Soeharto Pada Pembukaan Rapat Kerja Badan Urusan Logistik Tanggal 17 Januari 1973, hlm 4-5.

<sup>34</sup> Fausan Adi Azhari, "Pasang Surut Sejarah BULOG di Indonesia pada tahun 1967-1998 (Up and Down History of BULOG in Indonesia 1967-1998)", dalam Digital Repository Universitas Jember, Desember 2015, (Jember : UNEJ Press, 2015), hlm 11 (<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68824>, diakses pada 16 Mei 2018 pukul 14:15).

<sup>35</sup> *Ibid.*

April 1971. Berikut tabel jumlah BUUD dari tahun 1971 hingga 1973

**Tabel 4.4 Jumlah BUUD Dari Tahun 1971-1973**

No.	Tahun	Jumlah BUUD
1.	1971	104
2.	1972	1.245
3.	1973	2.315

Sumber : Bappenas, *Laporan Pelaksanaan Repelita I 1969/1970-1974/1975*, (Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas, 1974), hlm 287.

Adanya petugas BUUD yang lalai melaksanakan tugasnya, tidak menjadikan lembaga ini dibubarkan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto justru menambah penempatan BUUD di tiap daerah, karena solusi yang terbaik ialah memperbaiki kinerja petugas BUUD. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, sejak pertama didirikan pada tahun 1971, jumlah BUUD mencapai 104. Pada tahun 1972 jumlah BUUD meningkat hingga sebelas kali lipat yaitu sejumlah 1.245, dan pada periode 1973 meningkat hampir dua kali lipat yaitu 2.315. Peningkatan jumlah BUUD ini, dapat menghimpun dan mendistribusikan beras secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dengan adanya BUUD, kesejahteraan petani dapat terjamin sebagai produsen maupun konsumen. Hal inilah yang menjadikan BUUD tetap dikembangkan dan diperkuat perannya hingga menjadi komponen utama perekonomian desa.

Pengembangan dan penguatan BUUD di pedesaan untuk mencapai dua tujuan yaitu petani dapat mendapatkan harga jual gabah sesuai dengan yang ditentukan. Tujuan kedua yaitu BUUD dapat mengembangkan usaha serta perannya dalam ekonomi pedesaan.<sup>36</sup> Peran BUUD yang maksimal, dapat menjaga harga padi di bawah ketentuan pemerintah, sehingga tidak merugikan petani. Selain menguntungkan petani, adanya BUUD juga tidak mengganggu eksistensi pedagang beras maupun tengkulak. Presiden Soeharto telah memberikan jaminan agar BUUD, pedagang beras, tengkulak, dan petani dapat bersinergi memenuhi stok nasional.<sup>37</sup> Menurut presiden BUUD bukan lembaga sementara melainkan suatu badan yang dipelihara dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pengadaan beras nasional.<sup>38</sup> Selain itu, seiring berjalannya usaha intensifikasi dan Panca Usaha di bidang pertanian, selama itu BUUD tetap diperlukan.

#### 4. Meningkatkan Produksi Beras

Kritik majalah *Tempo* terhadap pemerintah mengenai peristiwa kelangkaan beras, menuntut pemerintah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Cara yang ditempuh pemerintah yaitu :

- Dalam rangka merangsang penanaman padi oleh petani, pemerintah meningkatkan harga beli padi kering lumbung petani. Sebelum masa paceklik periode 1972/1973, harga dasar padi kering mengikuti penetapan harga tahu 1970 yaitu sebesar Rp 13,20,- per kilogram.<sup>39</sup> Namun pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973, harga pagi kering naik menjadi Rp 21,20

per kilogram. Sedangkan pada permulaan tahun 1974, harga padi kering meningkat hingga Rp 30,- per kilogram.

- Mensosialisasikan program Bimas Gotong Royong. Konsep program Bimas Gotong Royong sama seperti bimas terdahulu yaitu pengembangan bibit unggul, penyuluhan, irigasi, industri pupuk dan pembenihan. Hal yang menjadi pembeda yaitu adanya dana bantuan dari perusahaan multi-nasional seperti Mitsubishi dan CIBA. Perusahaan tersebut memberi bantuan berupa kendaraan, pupuk, sprayer, pestisida, dan pesawat terbang untuk mengendalikan hama dari udara.<sup>40</sup>

Untuk memaksimalkan program Bimas Gotong Royong dan Insus, pemerintah telah menetapkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di daerah-daerah. Berikut data jumlah PPL dan PPS tahun 1971 hingga 1973 :

**Tabel 4.5 Jumlah PPL dan PPS tahun 1970-1973**

No.	Tahun	PPL	PPS
1.	1971	1.823	113
2.	1972	2.747	152
3.	1973	3.960	197

Sumber : Bappenas, *Laporan Pelaksanaan Repelita I 1969/1970-1974/1975*, (Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas, 1974), hlm 287.

Berdasarkan tabel diatas, setiap tahun jumlah PPL dan PPS meningkat cukup signifikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah PPL dan PPS, pelaksanaan program Bimas Gotong Royong dan Insus dapat berjalan secara maksimal, sehingga pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada beras.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Keberanian majalah *Tempo* dalam melontarkan kritik terhadap pemerintah, sesuai dengan fungsi sistem pers liberal menurut Siebert yaitu menjadi pengawas kebijakan pemerintah dan media informasi bagi masyarakat. Berdasarkan analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman, kritik yang disampaikan oleh majalah *Tempo* dapat bernilai objektif dan subjektif. Unsur objektif dilihat dari bukti di lapangan bahwa pemerintah dan aparatnya belum mampu mengurus persediaan beras. Sedangkan subjektif dilihat dari segi bahasa kritik yang disampaikan kepada pemerintah seperti “induk ayam yang mengorek sisa makanan dari bak sampah”.

Keberanian majalah *Tempo* dalam menyampaikan kritik, dapat dipengaruhi oleh konsep dasar kebebasan pers liberal yang diungkapkan oleh John Keane yaitu memberikan keleluasaan bagi setiap masyarakat untuk menilai suatu peristiwa yang terjadi. Dalam menyampaikan kritik, majalah *Tempo* memiliki alasan bahwa kinerja pemerintah dan aparatnya dinilai kurang maksimal sehingga dapat menimbulkan kelangkaan beras.

Kritik majalah *Tempo* terkait kasus kelangkaan beras, mengundang respon tidak langsung dari pemerintah.

<sup>36</sup> Bappenas, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84*, (Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas, 1979), hlm 418.

<sup>37</sup> Tim Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973*, (Jakarta, PT Citra Kharisma Bunda : 2003), hlm 20.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 257.

<sup>40</sup> Nataatmadja, H., D. Kertosastro dan A. Suryana, *Perkembangan Produksi dan kebijakan Pemerintah dalam Produksi Beras Monograph Padi Buku I*, (Jakarta : Puslitbangtan, 1988), hlm 37-53.

Respon tersebut terlihat dari tindakan pemerintah terutama presiden untuk memperbaiki kinerja BULOG dan BUUD. Selain itu, pemerintah tetap melakukan usaha-usaha meningkatkan produksi padi nasional seperti memaksimalkan program Bimas dan Insus. Pemerintah juga menambah petugas-petugas penyuluh pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada petani dalam meningkatkan produksi padi. Usaha-usaha ini dapat mengantarkan Indonesia swasembada beras pada tahun 1984. Respon yang dilakukan pemerintah terhadap kritik yang disampaikan majalah *Tempo* menandakan bahwa pers masih menjadi salah satu senjata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

#### Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengkajian sejarah pers di Indonesia. Analisis kritik sosial dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan pengkajian kritik sosial pers. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan perkembangan pers saat ini dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan aparatnya serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip/Dokumen

- Bappenas. 1974. *Laporan Pelaksanaan Repelita I 1969/1970-1974/1975*. Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 1979. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84*. Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik.
- Lembar Amanat Presiden Soeharto Pada Pembukaan Rapat Kerja Badan Urusan Logistik Tanggal 17 Januari 1973.

##### Buku

- . 2016. *Annual Report Of PT Tempo Inti Media Tbk*. Jakarta : PT Tempo Inti Media.
- Abar, Ahmad Zaini. 1995. *Kisah Pers Indonesia 1966 – 1972*. Yogyakarta : LKiS.
- Eryanto, Nugroho, Bimo, dan Fransurdiadi. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta : LKiS.
- Eryanto. 2002. *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*. Yogyakarta : LKiS.
- Gotschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press.
- Haryanto, Ignatius. 1996. *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta : PT Mega Media Abadi.
- Hutabarat, Arifin Hutabarat. 1974. *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.

Nataatmadja, H., D. Kertosastro dan A. Suryana. 1988. *Perkembangan Produksi dan kebijakan Pemerintah dalam Produksi Beras Monograph Padi Buku I*. Jakarta : Puslitbangtan.

Pontoh, Coen Husain. 2008. *Konflik Nan Tak Kunjung Padam dalam Andreas Harsono dan Budi Setiyono, Jurnalisme Sastrawi (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat)*. Jakarta : Gramedia.<sup>1</sup>

Steele, Janet. 2005. *Wars Within : The Story of Tempo an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta : Equinox Publishing Indonesia.

Sumadiria, As Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature "Panduan Praktis Jurnalis Profesional"*. Bandung : Simbiosis Sekatama Media.

Tim Dokumentasi Presiden RI. 2003. *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973*. Jakarta : PT Citra Kharisma Bunda.

##### Majalah dan Surat Kabar

- Abar, Akhmad Zaini. 08 Maret 1994. "Kritik Sosial, Negara, dan Demokrasi". Dalam *Republika*.
- Abar, Akhmad Zaini. 08 Maret 1994. "Kritik Sosial, Negara, dan Demokrasi". Dalam *Republika*.
- Akhmad Zaini Abar. 1997. Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia. UNISIA No. 32/XVII/IV/1997.
- Akhmad Zaini Abar. 1997. Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia. UNISIA No. 32/XVII/IV/1997.
- Kahfi, Ratjul. 13 Maret 1972. "Rentjana Kulit Muka". Dalam *Tempo*
- Tempo. 16 Desember 1972. "Jerawat-Jerawat Sang Ratu".
- Tempo. 16 Juni 1973. "Bak Belanda minta Tanah".
- Tempo. 18 Nopember 1972. "Antara Ada dan Tiada".
- Tempo. 19 Mei 1973. "Diusik Instruksi James Bond".
- Tempo. 23 Juni 1973. "Menekan Beban Impor".
- Tempo. 28 Oktober 1972. "Ratu Pelita Sedang Gundah".
- Tempo. 30 Desember 1972. "Konflik Dalam Hajad dan Hambatan".

##### Jurnal

Azhari, Fausan Adi. 2015. Pasang Surut Sejarah BLOG di Indonesia pada tahun 1967-1998 (Up and Down History of BULOG in Indonesia 1967-1998). Jember : Digital Repository Universitas Jember, UNEJ Press, (<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68824>, diakses pada 02 Desember 2017 pukul 11:00).

##### Website

Laman Tempo Media Grup (<https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 09.47 WIB).

